

# PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENYELENGGARAAN PB DI DAERAH

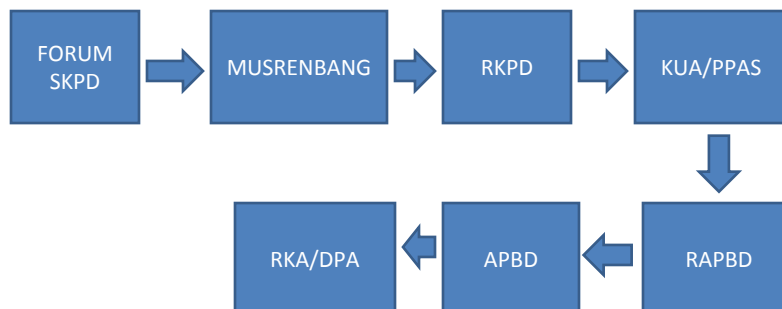
**Temmy Purboyono,  
Kepala Seksi Program BPBD  
Provinsi Jawa Tengah  
(HP: 0812-284-8144)**

Diskusi Anggaran PB pada Pemerintah Daerah  
Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta  
Kamis, 3 Juni 2010

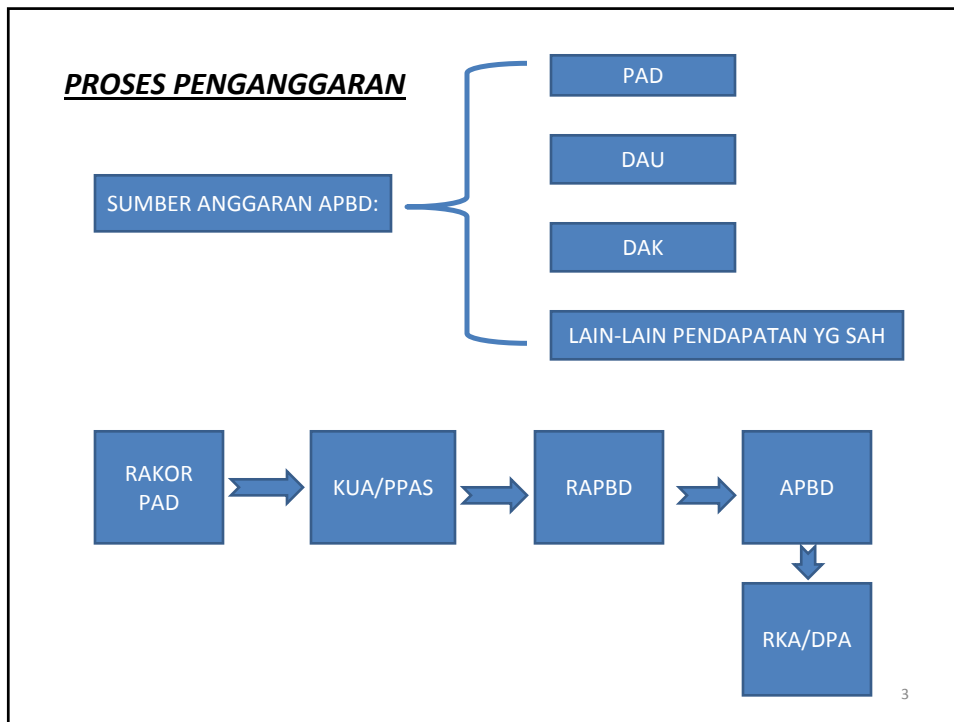
1

## KAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KEBENCANAAN DI DAERAH

### PROSES PERENCANAAN :



2



REGULASI PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PUSAT DAN DAERAH	
Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana DIPA dari APBN (untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga/departemen terutama untuk kegiatan <b>PRB</b>).</li> <li>2. Dana Contingency (untuk penanganan kesiapsiagaan).</li> <li>3. Dana Siap Pakai/<i>on call</i> (untuk bantuan kemanusiaan/<i>Relief</i> pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat).</li> <li>4. Dana bantuan Sosial berpola hibah (dana yang dialokasikan untuk bantuan pasca-bencana di daerah).</li> <li>5. Dana yang bersumber dari masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana DPA dari APBD (untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional BPBD terutama untuk kegiatan pengurangan PRB).</li> <li>2. Dana Tidak Terduga Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Dana yang bersumber dari masyarakat</li> </ol>

4

## **AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA**

UNTUK DANA YG BERSUMBER DARI APBD, AKUNTABILITASNYA DIPERIKSA  
SECARA RUTIN OLEH BIRO KEUANGAN DAN INSPEKTORAT DAERAH  
SETIAP TAHUN APBD DIAUDIT OLEH BPKP

UNTUK DANA YG BERSUMBER DARI APBN, AKUNTABILITASNYA DIPERIKSA  
SECARA RUTIN OLEH INSPEKTORAT UTAMA DAN BPK/BPKP

5

## **PROGRAM DAN KEGIATAN KEBENCANAAN DI BPBD JATENG**

PROGRAM DAN KEGIATAN DI BPBD PROVINSI JAWA  
TENGAH SEBAGAI BERIKUT:

6

## **PERMASALAH-PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA**

1. TERPADU (TERGANTUNG PADA DUIT) YAITU BAHWA USULAN PERENCANAAN KEBENCANAAN PASTI MENDAPATKAN PORSI YANG KECIL DAN TIDAK DIPERHATIKAN (MIND SET DARI TAPD BAHWA BENCANA HANYA BERKUTAT PADA TANGGAP DARURAT.
2. BELUM SINKRON DAN TERINTEGRASINYA PERENCANAAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT
3. BELUM SINKRON DAN TERINTEGRASINYA PERENCANAAN DENGAN SKPD LAIN
4. BELUM SINKRON DAN TERINTEGRASINYA PERENCANAAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
5. PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA MASIH DILIPUTI KERAGU-RAGUAN

7

# **TERIMA KASIH**

8